



EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kabupaten/ Kota Dan Provinsi Gorontalo



Mahyudin Humalangi, S.E., M.Si
Nancy Noviana Lantapo, S.Pt., M.Si.
Ivana Butolo, S.E., M.P.
Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.
Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M.

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI GORONTALO

Mahyudin Humalangi, S.E., M.Si
Nancy Noviana Lantapo, S.Pt., M.Si.
Ivana Butolo, S.E., M.P.
Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.
Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M.



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI GORONTALO

Penulis:

Mahyudin Humalanggi, S.E., M.Si
Nancy Noviana Lantapo, S.Pt., M.Si.
Ivana Butolo, S.E., M.P.
Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.
Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 136, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-212-0

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dimana kemiskinan dapat memberikan dampak yang cukup luas, misalnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Maka dalam konteks itu pemerintah berupaya untuk mengatasi kemiskinan, bahkan bank dunia dalam program *Sustainable Development Goals (SDGs)* menempatkan masalah kemiskinan pada pilar pertama.

Belakangan program SDGs menjadi acuan dalam penyusunan rencana program pemerintah, selain itu pentingnya masalah kemiskinan untuk diantaskan setiap periode pemerintahan mendesain program, termasuk pemerintah daerah. Ada puluhan bentuk program yang dicanangkan pemerintah baik sifatnya program parsial maupun program kolaborasi. Dari sekian banyak program kolaborasi tentu ada yang efektif maupun kurang efektif. Maka tentunya untuk mengetahui efektifitas program maka diperlukan evaluasi, untuk melihat program mana yang paling efektif dan program yang perlu dievaluasi.

Program kolaborasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo sendiri dipandang penting untuk dievaluasi, mengingat begitu banyaknya program maupun pembiayaan yang telah digelontorkan, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi. Bahkan Provinsi Gorontalo ditempatkan sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Padahal diawal berdirinya sebagai provinsi sendiri lepas dari Sulawesi Utara penurunan angka kemiskinan cukup curam, seiring perkembangan waktu dimana program pengentasan kemiskinan makin banyak dan pembiayaan program makin besar tetapi penurunan angka kemiskinan makin landai.

Buku ini disusun atas kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo dengan Lembaga Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Mengingat pentingnya evaluasi ini maka penulis berharap ada masukan yang konstruktif agar evaluasinya dapat dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan kedepannya.

Selesaiya buku ini tentu tidak bisa berjalan sendirian, butuh kolaborasi serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, masukan maupun koreksinya. Dan puncak terima kasih kami ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya sehingga dokumen evaluasi dapat tersusun dengan baik.

Gorontalo, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KONDISI UMUM DAERAH.....	6
2.1 Geografi Dan Demografi Wilayah.....	6
2.2 Administrasi Wilayah	11
2.3 Struktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	12
2.4 Inflasi	17
BAB 3 PROFIL KEMISKINAN DAERAH	19
3.1 Konsep Kemiskinan.....	19
3.2. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah.....	35
3.3. Analisis Kondisi Umum Kemiskinan Daerah.....	40
BAB 4 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM	51
4.1 Arah Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan.....	51
4.2 Program Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan.....	52
BAB 5 INDIKASI AKAR PERMASALAHAN KEMISKINAN	64
5.1 Analisis Akar Permasalahan	64
5.2 Analisis Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan	68
BAB 6 RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD	75
6.1 Evaluasi APBD	75
6.2 Analisis Anggaran Belanja	83
BAB 7 ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH	91
7.1 Isu Strategis	91
7.2 Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.....	94
BAB 8 PENUTUP	128
DAFTAR PUSTAKA.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo Tahun 2022	8
Tabel 2.2	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022	9
Tabel 2.3	Luas Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2022	11
Tabel 2.4	Jumlah Desa dan Kecamatan di Provinsi Gorontalo Tahun 2022	12
Tabel 2.5	Persentase Pertumbuhan PDRB Provinsi Gorontalo Menurut Lapangan Usaha 2022	15
Tabel 3.1	Pengukuran Kemiskinan Indonesia Menurut BPS	24
Tabel 3.2	Perincian Bidang dan Indikator Utama Kondisi Kemiskinan	29
Tabel 3.3	Angka Kemiskinan Makro Provinsi Gorontalo 2017 – 2022	36
Tabel 3.4	Angka Kemiskinan Perkotaan Dan Perdesaan Provinsi Gorontalo Periode Maret – September 2022	37
Tabel 3.5	Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo (Maret-September 2022)	38
Tabel 3.6	Komoditi Makanan yang Berkontribusi Besar Terhadap Garis Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Periode September 2022	39
Tabel 3.7	Komoditi Bukan Makanan yang Berkontribusi Besar Terhadap Garis Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Periode September 2022	40
Tabel 3.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Dari Tahun 2017-2022	43
Tabel 5.1	Statistik Deskripsi	70
Tabel 5.2	Output Uji Hausman	71
Tabel 5.3	Ringkasan Hasil Regresi Faktor Determinan Transfer Fiskal Menurunkan Angka Kemiskinan	71
Tabel 6.1	Struktur Anggaran Pendapatan Provinsi Gorontalo 2018-2022	77
Tabel 6.2	Perkembangan Ruang Fiskal Provinsi Gorontalo 2018-2022	80
Tabel 6.3	Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022	82
Tabel 7.1	Rencana Aksi Daerah dan Program Kegiatan	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo	4
Gambar 2.1	Peta Provinsi Gorontalo	6
Gambar 2.2	Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2022.	7
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Gorontalo, 2022	10
Gambar 2.4	Piramida Kependudukan Gorontalo	11
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2018-2022	13
Gambar 2.6	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Gorontalo, 2018-2022	14
Gambar 2.7	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Gorontalo Berdasarkan Lapangan Usaha, 2022	16
Gambar 2.8	Distribusi PDRB Provinsi Gorontalo Berdasarkan Pengeluaran	17
Gambar 2.9	Inflasi Year on Year Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	18
Gambar 3.1	Bagan Kerangka Logis Analisis Kemiskinan dan Determinan Kemiskinan (Sumber: Buku Pedoman Petunjuk Teknis TNP2K.	33
Gambar 3.2	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Periode September 2022 (2023)	41
Gambar 3.3	Persentase Lima Provinsi Angka Kemiskinan Tertinggi di Indonesia 2022, (2023) Di Indonesia Tahun 2022, (2023)	42
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 (2023)	42
Gambar 3.5	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo	45
Gambar 3.6	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan, 2022	46
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Status Bekerja, 2022.	47
Gambar 3.8	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Sektor Pekerjaan, 2022	49

Gambar 3.9	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kepemilikan Jamban & Air Layak	50
Gambar 4.1	Sinergi Arah RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	52
Gambar 5.1	Perkembangan Angka Kemiskinan Provinsi Gorontalo, 2002 – 2022	68
Gambar 5.2	Perbandingan Besaran Transfer Dana Desa dan Kemiskinan Perdesaan di Gorontalo, 2018 – 2022	70
Gambar 6.1	Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022	75
Gambar 6.2	Perkembangan perbandingan PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022	78
Gambar 6.3	Komponen PAD Provinsi Gorontalo 2018-2022	79
Gambar 6.4	Perkembangan Ruang Fiskal Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022	81
Gambar 6.5	Rasio Kemandirian Fiskal (%) Provinsi Gorontalo dan Perkembangannya selama tahun 2018 – 2022	83
Gambar 6.6	Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022	84
Gambar 6.7	Analisis Efektifitas Belanja Menurut Fungsi Provinsi Gorontalo Terhadap Capaian Bidang Kemiskinan Tahun 2018 – 2022	85
Gambar 6.8	Efektifitas Anggaran Belanja Provinsi Gorontalo Terhadap Capaian Bidang Pendidikan tahun 2018-2022	86
Gambar 6.9	Efektifitas Anggaran Belanja Provinsi Gorontalo Terhadap Capaian Bidang kesehatan tahun 2018-2022	87
Gambar 6.10	Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022	88
Gambar 6.11	Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022	89

BAB 1

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dimana kemiskinan menjadi tantangan pembangunan, padahal pembangunan berkaitan dengan bagaimana ‘negara-negara berkembang’ dapat menjadi lebih baik standar hidup mereka (Kingsbury, 2004). Agar kemiskinan tidak menjadi tantangan pembangunan membutuhkan keseriusan untuk mengatasinya, karena itu dalam program pembangunan global yang bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs), kemiskinan ditempatkan sebagai pilar pertama yang perlu dibereskan, dengan kata lain bahwa SDGs memiliki tujuan yang besar, salah satu targetnya adalah memberantas kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 untuk semua orang di mana pun (Kamruzzaman, 2016). Dilihat dari indikator, penyebab dan definisi kemiskinan begitu luas, maka penanggulangannya pun membutuhkan penanganan multistakeholders secara sinergi, dengan memberikan bantuan tunai maupun non tunai agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang layak. Menurut Slater (2011) dan Barrientos (2011), bantuan tunai merupakan bagian penting dan terus berkembang dalam program perlindungan sosial yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan di negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan keterlibatannya mendesain program untuk mempercepat penanggulangannya. Di Indonesia sendiri, kemiskinan secara geografis paling besar angkanya di wilayah perdesaan dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan, maka dari itu sejatinya penanganan kemiskinan selain ke manusiannya, juga wilayah sasaran diperkuat di perdesaan. Apalagi di Indonesia, jumlah penduduk yang bermukim di perdesaan jauh lebih besar dibanding penduduk perkotaan, kondisi serupa tentunya dialami oleh Provinsi Gorontalo. Bilamana dilihat pembentukan ekonomi Gorontalo sendiri didominasi oleh sektor pertanian, setiap tahun sektor ini menyumbang rata-rata 37 – 39 persen.

Maka dalam konteks itu, di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terbaru dari Nugroho et al. (2021) mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan masih berlanjut dengan berbagai varian program yang diluncurkan oleh pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan dimaksudkan untuk meringankan pengeluaran rumah tangga dalam jangka pendek. Belakangan, pemerintah mengembangkan program yang lebih maju, seperti bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), dan bantuan sekolah Program Indonesia Pintar (PIP), untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Meskipun setiap program memiliki aspek yang unik, mereka juga memiliki beberapa tantangan yang sama, seperti penargetan yang buruk dan kurang saling melengkapi antar program antar level pemerintah.

Kendala dalam pengentasan kemiskinan, yakni data tentang penduduk miskin yang kadangkala lambat diperbarui. Penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi harus dimasukkan dalam data terkini dimana masih terjadinya inclusion dan exclusion error pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masih perlu adanya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena belum adanya kepadanan antara DTKS dengan NIK penerima Jaring Pengaman Sosial. Ini terkait program jaring pengaman sosial yang akan digulirkan.

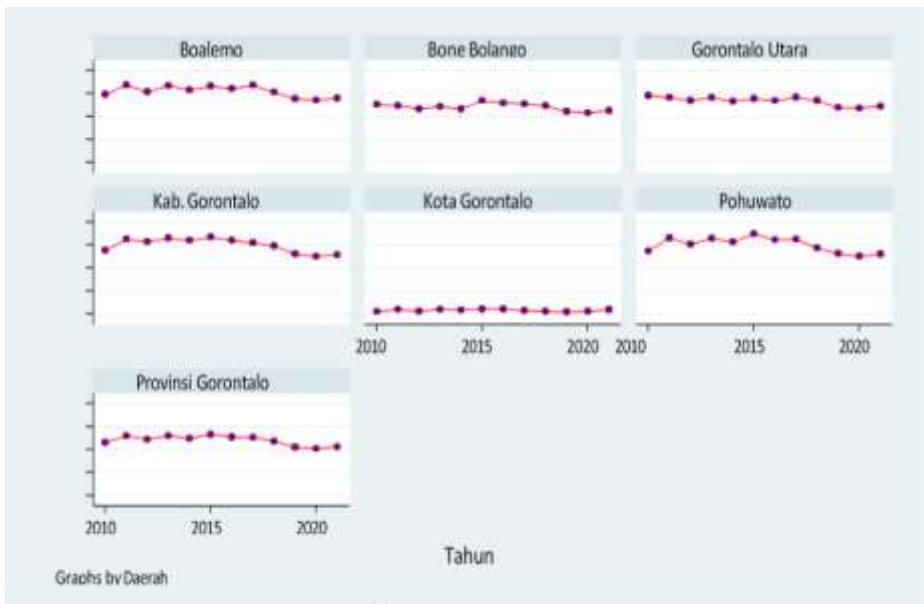
Ketepatan dan kesesuaian target, menentukan sukses tidaknya program jaring pengaman sosial yang disalurkan. Upaya Jaring Pengaman Sosial ini adalah untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Tidak kalah penting adalah pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program ini menyasar utamanya pada level usaha mikro kecil menengah yang paling rentan terdampak akibat Covid-19. Mereka mesti dibuatkan program yang memungkinkan bertahan dalam kondisi krisis. Selain itu berupaya untuk menjalin sinergi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Fokus berikutnya, yaitu permasalahan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang masih relatif bergantung terhadap transfer pemerintah pusat, maka dari itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengentasan kemiskinan di daerah, sebab penelitian yang dilakukan oleh Nursini (2019) mengemukakan bahwa pendapatan pemerintah daerah dan transfer antar pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Artinya, peningkatan pendapatan pemerintah dan transfer antar pemerintah di setiap daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang dapat digunakan untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan secara efektif.

Maka dalam konteks itu, belanja pemerintah daerah sejatinya fokus mendanai program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan, sementara OPD yang tidak terkait anggarannya dibatasi saja. Selain juga pentingnya melihat secara detil program OPD paling efektif yang dapat mengentaskan kemiskinan, program yang kurang efektif sebaiknya diganti (dihapus) dengan menggser anggaran ke program yang lebih efektif. Penelitian efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Tohari et al. (2019) yang memperkenalkan sistem penargetan terpadu, dalam penelitian tersebut mengevaluasi tiga program sosial terbesar di Indonesia secara bersamaan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian Beras Miskin (Raskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan menggunakan sistem penargetan terpadu yang merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan untuk menyatukan kelayakan program, mengurangi kesalahan penargetan, dan meningkatkan komplementaritas program menunjukkan bahwa kemungkinan rumah tangga sasaran menerima ketiga program meningkat sebesar 117 persen. Analisis ini menjelaskan bahwa rumah tangga yang menerima ketiga program pelengkap memiliki pengeluaran per kapita setidaknya 30 poin persentase lebih tinggi daripada mereka yang tidak menerima sama sekali.

Namun demikian, upaya penurunan angka kemiskinan seakan tidak ada artinya bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal itu disebabkan pada awal tahun 2020 adanya pandemi Covid-19. Pandemi tersebut yang menyerang kesehatan tubuh manusia yang menyebabkan kematian, selain menyerang kesehatan manusia juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait tingkat kemiskinan kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo dapat ditampilkan pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Gambar 1.1 Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo

Terlihat bahwa kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih relatif tinggi, hanya Kota Gorontalo yang tingkat kemiskinannya masih cukup rendah dibandingkan daerah lain. Rata-rata tingkat kemiskinan selama 2011 hingga 2022 untuk Kabupaten Boalemo masih 20.42 persen, Kabupaten Gorontalo 19.93 persen, Kabupaten Pohuwato sebesar 19.99 persen, Kabupaten Bone Bolango 16.99 persen, Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 18.23 persen, Kota Gorontalo 5.79 persen serta Provinsi Gorontalo masih 16.91 persen secara rata-rata selama sebelas tahun terakhir.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan (urusan) yang cukup luas, termasuk program pengentasan kemiskinan. Di bidang ekonomi, perencanaan pembangunan menjadi kewenangan penuh bagi pemerintah kabupaten/kota. Model dan desain pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada mereka, demikian halnya pembiayaan pengentasan kemiskinan lewat mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kewenangan di daerah. Hanya saja postur APBD di hampir semua kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Gorontalo rata-rata belanja publik jauh lebih kecil secara proporsi dibandingkan belanja pegawai, boleh jadi dengan performa anggaran seperti itu kondisi kemiskinan penurunannya kurang signifikan.

Menghadapi situasi tersebut diperlukan kebijakan afirmatif untuk membangun konektivitas kebijakan menanggulangi kemiskinan baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun yang di pemerintah Provinsi Gorontalo, namun dibutuhkan langkah-langkah yang tepat. Jika selama ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah merumuskan program unggulan (Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Kerakyatan) pada dasarnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Hanya saja implementasi program tersebut masih dampaknya masih terbatas untuk mengurangi angka kemiskinan, karena itu diperlukan rumusan kebijakan yang efektif mengurangi angka kemiskinan dengan menyusun kerangka Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD).

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. A. & Payu, B, (2019). Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia, *Economics Development Analysis Journal*, 8 (4), 324-334. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i4.31698>.
- Arham, M. A., & Hatu, Rauf, (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson From Indonesia, *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7 (10), 433 – 442. <https://doi.org/10.13106/jafeb>.
- Arham, M., A. & Naue, T. F. (2015). Public Expenditures and Poverty: Evaluation of The Government's Priority Programs in Gorontalo Province, *Economic Journal of Emerging Markets*, 7 (2), 107 – 119. <http://dx.doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss2.art4>.
- Bahri, S. (2021). Dropped Out of School Prevention Through the Smart Indonesia Program, Proceedings of the International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (ICETeP 2020). 10.2991/assehr.k.210227.080.
- Barrientos, A., (2011). Social Protection and Poverty, *International Journal of Social Welfare*, 20 (3), 240 – 249, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00783.x>.
- Budiman, I. (2022), Implementation of Indonesia Smart Card Policy in an Effort of Education Equality in Vocational School, *PPSDP International Journal of Education*, 2 (2), 191 – 196. doi: <https://doi.org/10.59175/pijed.v2i2.85>.
- Daforsa, F., & Handra, H. (2019). Analysis of village fund management in poverty alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(6), 717 - 728. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6817>
- Duah, W.A., Gbedoho, E. K., Peprah, P., Arthur, F., Sobeng, A. K., & Okyere, J. (2018), I Kafui Gbedoho, (2018). Reducing Poverty Through Fiscal Decentralization in Ghana and Beyond: A Review Williams Agyemang-DuahORCID, *Cogent Economics & Finance*, 6 (1), <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1476035>.

- Gaarder, M. M., Glassman, A. & Todd, J. E. (2010). Conditional Cash Transfers and Health: Unpacking The Causal Chain, *Journal of Development Effectiveness*, 2 (1), 6 – 50, <https://doi.org/10.1080/19439341003646188>.
- Hadna, H. A., Kartika, D. & Tong, K. (2017). Evaluation of Poverty Alleviation Policy: Can Conditional Cash Transfers Improve the Academic Performance of Poor Students in Indonesia?, *Cogent Social Sciences*, 3 (1), 1 – 15. doi.org/10.1080/23311886.2017.1295548.
- Hussain, S., Hali, S. M., Ahmad, R., Iqbal, S., & Iftikhar, H., (2021). Fiscal decentralization and poverty alleviation: A Case Study of Pakistan, *Poverty and Public Policy*, 13 (2), 139 – 154. <https://doi.org/10.1002/pop4.304>
- Kabeer, N. & Waddington, H. (2015). Economic Impacts of Conditional Cash Transfer Programmes: A Systematic Review and Meta-Analysis, *Journal of Development Effectiveness*, 7 (3), 290 – 303. <https://doi.org/10.1080/19439342.2015.1068833>.
- Kamruzzaman, P. (2016). A Critical Note on Poverty Eradication Target of Sustainable Development Goals, *European Journal of Sustainable Development*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n2p87>.
- Kingsbury, D., Remenyi, J., McKay, J. & Hunt, J. (2004). Key Issues in Development, Palgrave Macmillan. New York, N.Y.
- Lee, K.W., & Hwang, M (2016). Conditional Cash Transfer Against Child Labor: Indonesia Program Keluarga Harapan, *Asia Pacific Education Review*, 17, 391 – 401. doi.org/10.1007/s12564-016-9436-7.
- Loureiro, A. O. F., (2012). Can Conditional Cash Transfers Reduce Poverty and Crime? Evidence from Brazil. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2139541> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2139541>.
- Malinao, A. P., Remandaban, R. R. V., & T. Abocejo, F. (2022). The Conditional Cash Transfer Program for Poverty Alleviation in the Philippines: A Policy Evaluation, *International Journal of Social Science Research and Review*, 5 (11), 509-516. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i11.845>
- Mo, D., Zhang, L., Yi, H., Luo, R., Rozelle, S. & Brinton, C. (2013). School Dropouts and Conditional Cash Transfers: Evidence from a

- Randomised Controlled Trial in Rural China's Junior High Schools, *The Journal of Development Studies*, 49 (2), 190 – 207. <https://doi.org/10.1080/00220388.2012.724166>.
- Nelson, K. (2013). Social Assistance and EU Poverty Thresholds 1990–2008. Are European Welfare Systems Providing Just and Fair Protection Against Low Income? Get access Arrow, *European Sociological Review*, 29 (2), 386 – 401. <https://doi.org/10.1093/esr/jcr080>.
- Ninghardjanti1, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2022). 1Evaluation of the Smart Indonesia Card (KIP) Program for the Vocational Schools in Surakarta City, Proceedings of the 1st UPY International Conference on Education and Social Science (UPINCESS 2022), 10.2991/978-2-494069-39-8_20.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I. & Marlina, I. (2021). Poverty Eradication Programs in Indonesia: Progress, Challenges and Reforms, *Journal of Policy Modeling*, 43 (6), 1204 – 1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I. & Marlina, I. (2021). Poverty Eradication Programs in Indonesia: Progress, Challenges and Reforms," *Journal of Policy Modeling*, 43 (6), 1204 -1224. <http://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>.
- Nugroho, D. F., Wicaksono, B. R., & Reynaldi, M. R. (2021). Special Allocation Fund and Poverty Rate in Indonesia, *Economics and Finance in Indonesia*, 67 (2), 1 – 12, hhttp: doi.org/10.47291/efi.v67i2.811.
- Nurokhmah, (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan, *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2 (1), 37 - 48. <https://doi.org/10.22146/jpmpmpi.v2i1.66256>.
- Nursini & Tawakal, (2019). Poverty Alleviation in The Context of Fiscal Decentralization in Indonesia, *Economics and Sociology*, 12 (1), 270 – 285. <http://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16>.
- Piperata, B. A., McSweeney, K., & Murrieta, R. S. (2016). Conditional Cash Transfers, Food Security, and Health: Biocultural Insights for

- Poverty-Alleviation Policy from the Brazilian Amazon, *Current Anthropology*, 57 (6), 806–826, <https://doi.org/10.1086/688912>.
- Putra, N. A., Badriah, L. S., Suharno & Suparno, C. (2023). The Effect of Village Funds, Village Fund Allocations, Tax, and Levy Revenue Sharing Funds on Poverty in Banjarnegara Regency, *Eco-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18 (1), 73 – 86. <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2022.18.1.3312>.
- Rahmatullah, A.F. & Rahmatullah, A. F. (20220. Kartu Indonesia Pintar sebagai Representasi No Poverty dan Education Dalam Paradigma Sustainable Development Goals, *International Journal of Demos*, 3 (3), 217 – 231. <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i3.110>.
- Resina, D., Kamarni, N. & Putra, F.P., (2022). Hope Family Program: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia?. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11 (3), 142 – 154.. <https://doi.org/10.23960/jep.v11i3.530>.
- Riphahn, R. T. (2003). Rational Poverty or Poor Rationality? The Take-up of Social Assistance Benefits, *The Review of Income and Wealth*, 47 (3), 379-398. <https://doi.org/10.1111/1475-4991.00023>.
- Rohmi, M. L., & Fahlevi, M. R. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2 (2), 91 – 105.
- Sajogyo. (1971). Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan, Yayasan Agroekonomika, Yokyakarta.
- Sajogyo. 1988. Masalah Kemiskinan di Indonesia Antara Teori dan Praktek Mimbar Sosek Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian.
- Skoufias, E. & Di Maro, V. (2008). Conditional Cash Transfers, Adult Work Incentives, and Poverty, *The Journal of Development Studies*, 44 (7), 935 – 960, <https://doi.org/10.1080/00220380802150730>.
- Slater, R. (2011). Cash Transfers, Social Protection and Poverty Reduction, *International Journal of Social Welfare*, 20 (3), 250 -259. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00801.x>.
- Son, H., 2008. Conditional Cash Transfer Programs: An Effective Tool for Poverty Alleviation?, Asian Development Bank. Philippines. Retrieved from <https://policycommons.net/artifacts/396382/conditional-cash->

- transfer-programs/1361116/ on 16 Sep 2023. CID: 20.500.12592/k0rkd8.
- Sugiyanto, E., Suharyono, Digdowiseiso, K., Waluyo, T., & Setiawan, H. D. (2018). Effects of Specific Allocation Fund (DAK) on Local Economic Development: A Mixed Method Analysis on Central Java Province, *Indonesia, Journal of Applied Economic Sciences (JAES)*, 8, 2385 – 2393.
- Suryahadi, A. & Izzati, R. A. (2018). Cards for the Poor and Funds for Villages, *Journal of Southeast Asian Economies*, 35 (2), 200 – 222.
- Tekgüç, H. (2018). Declining Poverty and Inequality in Turkey: The Effect of Social Assistance and Home Ownership, *South European Society and Politics*, 23 (4), 547 – 570.
<https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1548120>.
- Tohari, A., Parsons, C. & Rammohan, A. (2019). Targeting Poverty Under Complementarities: Evidence From Indonesia's Unified Targeting System, *Journal of Development Economics*, 140 (9), 127 – 144.
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002>.
- Uriyalita, F., Syahrodi, J., & Sumanta. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. *Edum Journal*, 3(2), 179–199.
<https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i2.69>
- Valeriani, D., Akbar, M. F., Rusdi, & Mardani, (2022). Consumption Patterns of Social Assistance (Bansos) Recipients in The Bangka Belitung Islands Province, *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10 (3), 165 - 174. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i3.18385>.
- Verme, P., (2016). Social Assistance and Poverty Reduction in Moldova, 2001-2004 - An Impact Evaluation, World Bank Policy Research Working Paper No. 4658.
- Wu, A., & Ramesh, M. (2014). Poverty Reduction in Urban China: The Impact of Cash Transfers, *Social Policy and Society*, 13 (2), 285-299. doi:10.1017/S1474746413000626.
- Yeoh, E. K., Ling, S. Y. P & Shy, F. P. (2012). Fiscal Reform, Decentralization and Poverty Alleviation In The Context of China's

12th Five-Year Plan, *Journal of Asian Public Policy*, 5 (2), 231- 251.
<https://doi.org/10.1080/17516234.2012.678737>.

Buku Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Gorontalo adalah sebuah kajian mendalam tentang upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Dalam buku ini, penulis melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai program yang telah diterapkan untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah Provinsi Gorontalo. Buku ini mengungkap efektivitas dan dampak dari program-program seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

Buku ini turut mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program-program pengentasan kemiskinan. Penulis menganalisis bagaimana investasi jangka panjang dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan penurunan angka kemiskinan yang berkesinambungan di Kota Gorontalo. Dalam hal ini, buku ini memaparkan upaya pemerintah dalam menciptakan program-program yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang, sehingga masyarakat dapat semakin mandiri secara ekonomi. Dengan menggabungkan perspektif masyarakat, kebijakan pemerintah, dan keberlanjutan program-program kemiskinan, buku ini memberikan gambaran lengkap tentang upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Gorontalo yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang tertarik dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-625-142-212-8

